

Katalog : 2104012.1204

# STATISTIK GENDER

## KABUPATEN TAPANULI TENGAH 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Katalog : 2104012.1204

# STATISTIK GENDER

KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
2022

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

# STATISTIK GENDER

## KABUPATEN TAPANULI TENGAH

### 2022

**Katalog** : 2104012.1204

**ISSN/ISBN** : -

**Nomor Publikasi** : 12040.2329

**Ukuran Buku** : 14,8 cm x 21 cm

**Jumlah Halaman** : xii + 71 halaman

**Penyusun Naskah:**

BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

**Penyunting:**

BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

**Pembuat Kover:**

BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

**Penerbit:**

©BPS Kabupaten Tapanuli Tengah

**Dicetak Oleh:**

E'KARYA

**Sumber Ilustrasi:**

*freepik.com*

*Dilarang memproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah*

## **Tim Penyusun**

### **Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah 2022**

**Pengarah:**

Drs. Anggiat Tulus Sibagariang

**Penanggung Jawab:**

Ravisa Noor, S.Tr.Stat.

**Editor:**

Ravisa Noor, S.Tr.Stat.

**Penyusun:**

Sri Rahayu Yogyana Sinurat, S.Tr.Stat.

**Desain Kover:**

Sri Rahayu Yogyana Sinurat, S.Tr.Stat.

**Desain Pembatas Bab:**

Sri Rahayu Yogyana Sinurat, S.Tr.Stat.



## Kata Pengantar

Penerbitan publikasi “Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah 2022” dimaksudkan untuk menyajikan data mengenai perempuan dalam kaitannya dengan komposisi penduduk, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, status sosial ekonomi rumah tangga, serta keikutsertaan dalam pemerintahan dan politik.

Untuk melihat gambaran yang lebih akurat seyogianya tersedia data terpilah yang lebih lengkap, namun dikarenakan data yang berbasis gender belum sepenuhnya tersedia baik data sekunder maupun primer maka penyusunan publikasi ini masih memerlukan banyak penyempurnaan.

Penerbitan Publikasi “Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah 2021” ini, diharapkan dapat melengkapi ketersediaan data khususnya data-data yang berbasis gender di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam terwujudnya publikasi ini serta kritik dan saran para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan publikasi di masa datang.

Pandan, Desember 2023

Kepala BPS Kabupaten  
Tapanuli Tengah,



**Drs. Anggiat Tulus Sibagariang**





# DAFTAR ISI

## Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah 2022

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	6
1.3 Sumber Data	6
Bab II Gambaran Umum Wilayah	9
2.1 Kondisi Geografis	9
2.2 Sosial Budaya	10
Bab III Demografi	15
3.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	17
3.2 Struktur Umur Penduduk	18
3.3 Karakteristik Penduduk menurut Status Perkawinan	20
Bab IV Pendidikan	25
4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)	27
4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	27
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	29
Bab V Kesehatan	35
5.1 Angka Morbiditas	37
5.2 Fasilitas Tempat Melahirkan	38

	Halaman
5.3 Penolong Persalinan	40
5.4 Lama Pemberian ASI	43
5.5 Pemberian Imunisasi	46
<b>Bab VI Perempuan di Sektor Publik</b>	<b>51</b>
6.1 Bidang Legislatif dan Yudikatif	52
6.2 Bidang Ekonomi	54
6.3 Bidang Pemerintahan	56
<b>Bab VII Pembangunan Gender</b>	<b>61</b>
<b>Bab VIII Kekerasan terhadap Perempuan</b>	<b>69</b>

## Daftar Tabel

	Halaman	
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2022	16
Tabel 3.2	Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022	17
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	26
Tabel 4.2	APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	29
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2022	30
Tabel 5.1	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Tapanuli Tengah Tahun 2020	36
Tabel 5.2	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022	37
Tabel 5.3	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Terakhir, Tahun 2022	38
Tabel 5.4	Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, Tahun 2022	40
Tabel 5.5	Persentase Baduta yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2022	41
Tabel 5.6	Persentase Wanita Usia Subur berstatus Pernah Kawin Menurut Lamanya Inisiasi Menyusui Dini Anak Terakhir Tahun 2021	43

	Halaman	
Tabel 5.7	Persentase Balita menurut Jenis Imunisasi yang Pernah Diberikan dan Jenis Kelamin, Tahun 2021	47
Tabel 6.1	Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Fraksi Tahun 2022	52
Tabel 6.2	Jumlah Hakim di Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 - 2022	54
Tabel 6.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2022	55
Tabel 6.4	Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022	57
Tabel 6.5	Banyaknya PNS Daerah Otonom Pemerintah Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022	58
Tabel 7.1	Komponen Pembentuk IPM	63
Tabel 7.2	IPM menurut Jenis Kelamin dan IPG Tahun 2022 Tapanuli Tengah	64
Tabel 8.1	Jumlah Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan/Tindak Kejahatan di Tapanuli Tengah Tahun 2021	70

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Piramida Penduduk Tapanuli Tengah Tahun 2022	19
Gambar 3.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun keatas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2022	21
Gambar 4.1 APM Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis Kelamin Tahun 2022	28
Gambar 6.1 Persentase PNS menurut Jenis Kelamin Tahun 2022	58
Gambar 7.1 IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022	62



# BAB I

## PENDAHULUAN







# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah membangun seluruh manusia yang ada untuk menjadi lebih baik dan sejahtera tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Namun demikian, peran serta perempuan dalam keberhasilan pembangunan masih banyak dikesampingkan dan dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak. Banyak negara di dunia pada saat ini berorientasi kearah kesetaraan gender dalam penyusunan program pembangunannya dengan maksud untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dan mewujudkan prinsip pembangunan yang berkeadilan.

Salah satu agenda pembangunan yang menjadi fokus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah kesetaraan gender. Adapun tujuan pembangunan gender yang ingin dicapai ialah mewujudkan kesetaraan berbasis gender serta memberdayakan perempuan dan anak.

Untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, maka kebutuhan dasar perempuan seperti kesehatan, pendidikan serta partisipasi kerja harus mendapat perhatian. Terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut akan mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Adapun istilah gender seringkali tumpang tindih dengan jenis kelamin, padahal dua kata tersebut merujuk pada bentuk yang berbeda. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis. Sedangkan konsep gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Dengan kata lain, gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dengan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Mengutip Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2014, tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, *gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat*. Berdasarkan konsep ini, perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk dari kondisi sosial/budaya setempat, bila tidak dinaungi oleh kebijakan yang sifatnya responsif gender, maka akan menimbulkan ketimpangan dan berbagai permasalahan sehingga pemerataan pembangunan tidak akan terwujud dengan baik dan adil.

Permasalahan ketidakadilan gender dapat ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini dan juga di masa mendatang.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kedudukan, peran, kualitas perempuan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta seluruh sektor pembangunan, maka

diperlukan ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan umur atau dapat diistilahkan dengan statistik gender.

Ketersediaan statistik gender sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Dengan menggunakan statistik gender, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut tentunya akan dapat dicapai dengan tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur di berbagai bidang. Ketersediaan fakta, data, dan informasi kesenjangan gender, berupa data terpilah dan fakta kesenjangan gender di berbagai sektor pembangunan juga sangat dibutuhkan karena dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi dan posisi laki-laki serta perempuan.

Publikasi Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah 2022, merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai instansi penyedia data, dalam rangka mewujudkan ketersediaan statistik gender, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah. Publikasi ini memberikan gambaran terkait peran serta perempuan dalam berbagai sektor baik pendidikan, kesehatan, pemerintahan, serta sektor lainnya.

Publikasi Statistik Gender, dapat pula menggambarkan berbagai isu gender yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal. Dalam sistem perencanaan nasional, isu-isu gender di daerah juga menggambarkan permasalahan nasional yang harus ditindaklanjuti secara komprehensif dan berkesinambungan oleh daerah. Oleh karena itu, statistik dan hasil analisis yang

dilakukan di tingkat kabupaten akan menjadi input yang sangat berharga bagi perencanaan pembangunan.

Selain itu, data dan informasi kesenjangan gender dapat digunakan untuk mengintegrasikan gender ke dalam berbagai sektor pembangunan, antara lain sektor strategis ekonomi, pendidikan, sosial budaya, hukum, politik, dan kesehatan.

## 1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan publikasi Statistik Gender Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022, yakni:

- Untuk menyusun data terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, statistik gender, dan isu-isu prioritas terkait pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan
- Meningkatkan ketersediaan data capaian pembangunan gender serta menyediakan hasil analisis isu-isu prioritas di berbagai bidang pembangunan sebagai bahan masukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender.

## 1.3 Sumber Data

Data yang disajikan meliputi data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya. Data tersebut diperoleh dari beberapa dinas maupun badan terkait, seperti Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Polres, dan tentunya juga dari data-data Badan Pusat Statistik yang bersumber dari SUSENAS, SAKERNAS, dan Potensi Desa (Podes).

# BAB II

## GAMBARAN UMUM





## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH

### 2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Tapanuli Tengah terletak di pesisir pantai Pulau Sumatera bagian Barat dengan panjang garis pantai kurang lebih 200 Km. Sebagian besar wilayah Tapanuli Tengah berada di daratan Pulau Sumatera, dan sebagian kecil berada di pulau-pulau kecil dengan jumlah sebanyak 32 pulau yang terletak di sekitar pantai barat Sumatera.

Dengan luas wilayah 2.194,98 Km<sup>2</sup>, Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri dari 20 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 215. Terdiri dari hamparan gunung, pantai, sungai, dan lautan menjadikan Kabupaten Tapanuli memiliki eksotisme tersendiri.

Secara astronomis, Kabupaten Tapanuli Tengah berada di ketinggian antara 0 – 1.116 mdpl dan terletak antara 1<sup>o</sup>11'0" sampai 2<sup>o</sup>22'0" Lintang Utara dan antara 98<sup>o</sup>07'0" sampai 98<sup>o</sup>12'0" Bujur Timur. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Berbatasan dengan Kota Sibolga dan Samudera Hindia di sebelah barat, dan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat di sebelah timur.

Sebagian besar wilayah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah berbatasan dengan laut, sehingga berpengaruh pada suhu udara yang tergolong daerah beriklim tropis. Pada tahun 2022 suhu udara di Kabupaten Tapanuli Tengah berkisar antara 18,40<sup>o</sup>C – 34,60<sup>o</sup>C dengan suhu tertinggi mencapai 34,60<sup>o</sup>C yakni pada bulan Februari.

Curah hujan di Kabupaten Tapanuli Tengah cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Curah hujan tertinggi di tahun 2022 terjadi pada bulan Juni (647,20 mm), dengan jumlah hari hujan sebanyak 22 hari. Sedangkan kecepatan angin tertinggi mencapai 22,00 m/detik yakni pada bulan Desember.

## 2.2 Sosial Budaya

Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas multietnik yaitu suku Batak, Minang, Jawa, Madura, Bugis, Cina, Aceh, Melayu, Sunda dan lain-lain, dengan mayoritas penduduk adalah suku Batak. Pelestarian nilai-nilai luhur dan kebangsaan, kerukunan, keamanan, ketertiban, dan toleransi dalam semangat gotong-royong yang terjalin dan terbina selama ini, membuat Kabupaten Tapanuli Tengah semakin kondusif dan tangguh secara sosial kemasyarakatan dalam menyikapi globalisasi dan berbagai perubahan yang begitu cepat.

Semangat gotong-royong terus dibina dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kesadaran, disiplin, kepedulian, dan semangat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dengan semangat *Sahata Saoloan* (Seia Sekata) untuk memperkokoh semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.

Kabupaten Tapanuli Tengah juga memiliki keberagaman agama. Berdasarkan data pencatatan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mayoritas penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah menganut agama Protestan yakni sebanyak 48,81% dari total penduduk. Kemudian yang terbesar selanjutnya adalah agama Islam sebanyak 38,17% dan agama Katolik 12,84 % dan sisanya menganut kepercayaan selain tiga agama yang disebutkan sebelumnya (Hindu, Budha, dan kepercayaan lain).

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa tiap kelompok etnis umumnya mempunyai agama yang beragam. Walaupun berbeda etnis maupun agama, di Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah terjadi konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Hal ini



disebabkan adanya usaha pencegahan dan penanggulangan konflik yang telah dilakukan oleh kelompok etnis maupun antar kelompok etnis, misalnya melalui hubungan kekeluargaan maupun melalui institusi-institusi sosial lintas kelompok etnis yang dibangun secara bersama-sama. Keragaman budaya yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan modal sosial yang sangat berharga untuk mewujudkan percepatan ekonomi daerah. Dengan potensi yang besar ini dapat menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang selama ini telah berjalan cukup harmonis.



# BAB III

## DEMOGRAFI





## BAB III DEMOGRAFI

Penduduk dalam pembangunan berperan sebagai objek dan subjek sekaligus. Sebagai objek, penduduk merupakan sasaran pembangunan, dan sebagai subjek, penduduk merupakan pelaku pembangunan. Suatu wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar berarti memiliki aset potensial yang berguna dalam mendukung proses pembangunan.

Jumlah penduduk yang banyak mengindikasikan bahwa tersedianya angkatan kerja yang banyak dan bila didukung dengan kualitas sumber daya yang memadai tentunya akan memberikan pengaruh besar dalam proses percepatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas penduduk sangat penting dilakukan untuk dapat mendukung jalannya pembangunan sehingga potensi besar yang ada dalam kuantitas penduduk dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan.

### 3.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni). Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2021 berjumlah 369.300 jiwa dan bertambah pada tahun 2022 menjadi 374.734 jiwa. Dengan kata lain, laju pertumbuhan penduduk Tapanuli Tengah pada 2022 sebesar 1,97 dibanding tahun 2021.

Jumlah penduduk Tapanuli Tengah setara dengan 2,48% dari total penduduk Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menjadikan Tapanuli Tengah sebagai daerah dengan jumlah penduduk terbanyak ke-12 dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Dengan luas wilayah keseluruhan yakni 2.194,98 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Tapanuli Tengah tahun 2022 yakni 171

jiwa/Km<sup>2</sup> dengan wilayah terpadat yakni kecamatan Pandan dengan tingkat kepadatan 1.786 jiwa per Km<sup>2</sup>.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin berdasarkan Tahun 2022

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinangsori	13.095	12.898	25.993	101,53
Badiri	14.411	13.451	27.862	107,14
Sibabangun	9.394	9.303	18.697	100,98
Lumut	6.521	6.468	12.989	100,82
Sukabangun	2.053	1.993	4.046	103,01
Pandan	31.085	30.179	61.264	103,00
Tukka	7.450	7.367	14.817	101,13
Sarudik	11.414	11.715	23.129	97,43
Tapian Nauli	10.611	10.170	20.781	104,34
Sitahuis	3.010	3.026	6.036	99,47
Kolang	10.885	10.634	21.519	102,36
Sorkam	8.316	8.574	16.890	96,99
Sorkam Barat	9.103	8.982	18.085	101,35
Pasaribu Tobing	3.806	3.879	7.685	98,12
Barus	9.090	8.643	17.733	105,17
Sosor Gadong	7.415	7.531	14.946	98,46
Andam Dewi	8.194	8.329	16.523	98,38
Barus Utara	2.414	2.541	4.955	95,00
Manduamas	11.765	11.766	23.531	99,99
Sirandorung	8.708	8.545	17.253	101,91
<b>Tapanuli Tengah</b>	<b>188.740</b>	<b>185.994</b>	<b>374.734</b>	<b>101,48</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni), BPS

Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah hampir sama yaitu 50,36% penduduk laki-laki dan

49,64% penduduk perempuan dengan kata lain, rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Tapanuli Tengah pada tahun 2022 sebesar 101,48.

Berdasarkan tabel 3.1, terdapat 12 kecamatan dengan rasio jenis kelamin diatas 100. Hal ini menunjukkan sebagian besar wilayah kecamatan di Tapanuli Tengah, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin dan Rasio Ketergantungan Menurut Kelompok Umur Tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Usia Non Produktif</b>				
0 - 14	51.826 (51,08%)	49.634 (48,90%)	100.460 (100,00%)	104
65+	7.771 (38,13%)	12.611 (61,87%)	20.382 (100,00%)	62
<b>Usia Produktif</b>				
15 - 64	129.143 (51,07%)	123.749 (48,93%)	252.892 (100,00%)	104
<b>Rasio Ketergantungan</b>	46,15	50,30	48,18	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Tapanuli Tengah

Bila dilihat dari kelompok umur, maka dapat dilihat menurut klasifikasi kelompok umur produktif dan kelompok umur non produktif sehingga dapat dilihat juga rasio ketergantungan dari masing-masing jenis kelamin. Kelompok umur non produktif terdiri dari kelompok umur muda dan kelompok umur tua, dimana kelompok umur muda adalah penduduk yang masuk kelompok umur 0-14 tahun, sementara kelompok umur tua adalah penduduk dengan kelompok umur 65 ke atas. Sementara itu kelompok umur produktif adalah penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun.

Berdasarkan tabel 3.2, jumlah penduduk laki-laki Tapanuli Tengah pada kelompok umur muda (0-14 tahun) lebih banyak dibanding perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 104. Artinya bahwa terdapat 104 penduduk laki-laki usia muda dari setiap 100 penduduk perempuan usia muda. Sementara sebaliknya, pada kelompok umur tua (65 tahun ke atas), jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki, dengan rasio jenis kelamin sebesar 6q. Artinya bahwa, dari 100 penduduk perempuan usia 65 tahun ke atas, hanya terdapat 62 penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Pada kategori usia produktif (15 – 64 tahun), komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan namun dengan jumlah yang hampir sama.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) menggambarkan beban tanggungan ekonomi yang harus ditanggung kelompok umur produktif terhadap kelompok umur muda dan tua. Semakin kecil angka rasio ketergantungan, semakin kecil pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk umur tidak produktif, dan begitu juga sebaliknya. Angka rasio ketergantungan Tapanuli Tengah tahun 2022 sebesar 48,18 yang artinya bahwa dari 100 penduduk umur produktif harus menanggung 48 penduduk umur tidak produktif baik itu anak-anak maupun lansia.

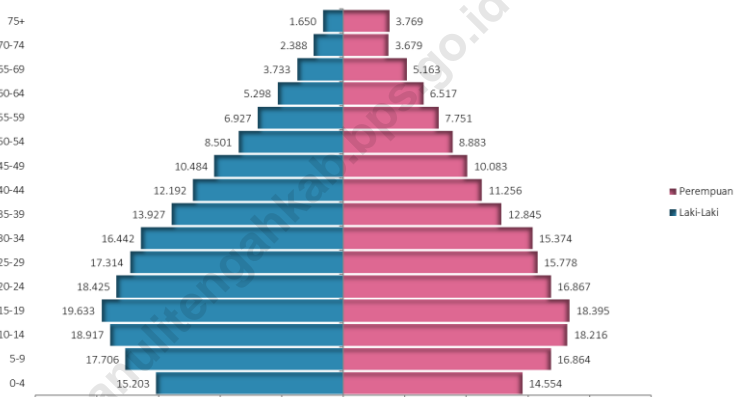
### 3.2 Struktur Umur Penduduk

Struktur umur atau komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan komponen yang penting dalam demografi. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur, dapat diketahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap keputusan yang akan diambil oleh penentu kebijakan suatu wilayah. Struktur jumlah penduduk yang dirinci menurut kelompok umur dan juga jenis kelamin



digambarkan melalui piramida penduduk. Dengan piramida penduduk dapat terlihat apakah suatu wilayah termasuk ke dalam wilayah dengan pola piramida ekspansif (piramida penduduk muda), stasioner (piramida penduduk berimbang), atau konstruktif (piramida penduduk tua). Piramida penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Tapanuli Tengah tahun 2022 disajikan dalam gambar 3.3.

Gambar 3.1 Piramida Penduduk Tapanuli Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS Tapanuli Tengah

Pola distribusi penduduk Tapanuli Tengah pada gambar 3.1 menunjukkan tingkat fertilitas yang tinggi, ditandai dengan banyaknya penduduk yang berada di kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebesar 29.757 jiwa, dan kelompok umur berikutnya mengikuti pola kenaikan samapai pada kelompok umur 15-19 tahun yang mencapai 38.028 jiwa. Pola distribusi penduduk seperti ini disebut pola piramida penduduk muda. Pola piramida penduduk muda menunjukkan bahwa penduduk di wilayah tersebut sedang mengalami pertumbuhan. Dengan jumlah penduduk muda yang besar, potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, untuk itu pemerintah harus bersiap menyediakan lapangan kerja yang cukup, karena permintaan tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah lapangan kerja akan menciptakan

pengangguran. Sementara itu, jika dilihat menurut komposisi jenis kelamin, jumlah penduduk wanita berusia 15-64 tahun atau yang tergolong wanita usia subur di Tapanuli Tengah cukup tinggi yaitu sebanyak 123.749 orang atau sekitar 33,02% dari total penduduk Tapanuli Tengah. Komposisi ini akan sangat berpengaruh pada tingkat fertilitas yang tinggi.

### 3.3 Karakteristik Penduduk Menurut Status Perkawinan

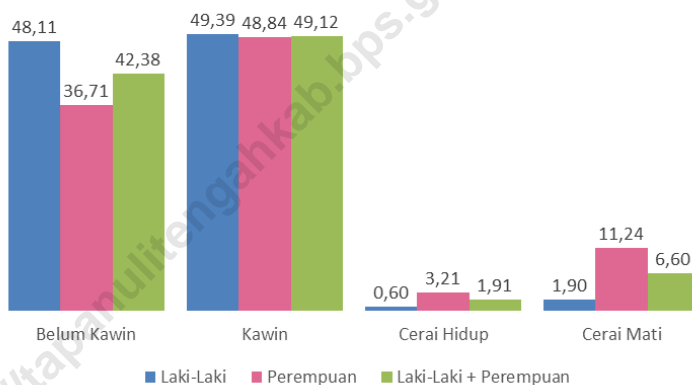
Status perkawinan adalah indikator awal untuk mengetahui pembentukan dan perkembangan sebuah keluarga (rumah tangga). Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga berperan penting dalam pembentukan tatanan masyarakat. Jika setiap keluarga mempunyai anggota keluarga yang berkualitas, maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat akan lebih baik dan berkualitas.

Dalam keluarga, peranan ibu sangat besar terutama dalam peningkatan kualitas hidup anggota keluarga. Perjuangan dan pengorbanan ibu dimulai dari mengandung anak-anaknya selama 9 (sembilan) bulan, lalu dilanjutkan proses kelahiran dan proses menyusui anaknya sampai usia 2 (dua) tahun. Ketiga proses ini sangat memegang peranan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya, karena itu ibu harus selalu memperhatikan zat-zat makanan yang masuk ke tubuh anaknya. Selain itu peranan ibu juga dibutuhkan sangat besar dalam hal pengasuhan dan perawatan bagi anaknya, mengatur pola konsumsi serta bertanggung jawab terhadap sarana kesehatan dalam rumah tangga.

Dalam budaya Indonesia, pembentukan sebuah keluarga harus dimulai dari perkawinan. Perkawinan merupakan proses yang sangat menentukan untuk mengubah status seorang laki-laki dan perempuan yang semula lajang menjadi suami-isteri. Status perempuan dan laki-laki sebelum menikah (lajang, duda atau janda) bahkan dapat direduksi melalui perkawinan. Oleh sebab itu, dengan

perkawinan akan terbentuk keluarga yang nantinya akan berperan penting dalam pembentukan individu. Status perkawinan merupakan gambaran pembentukan rumah tangga yang membedakan status perkawinan penduduk yang berusia lebih dari 18 tahun, dengan status belum kawin, kawin, cerai hidup atau cerai mati. Dengan kategorisasi ini langsung diketahui pula berapa banyak penduduk yang berstatus lajang, duda atau janda.

Gambar 3.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan Tahun 2022



Sumber: BPS Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 menunjukkan persentase penduduk perempuan berumur 10 tahun ke atas yang kawin lebih besar dibandingkan persentase penduduk laki-laki 10 tahun ke atas yaitu sebesar 49,39% untuk penduduk laki-laki dan 48,84% untuk perempuan. Sama halnya dengan penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum kawin didominasi laki-laki juga dengan persentase sebesar 48,11%. Hal ini dapat menjelaskan bahwa laki-laki cenderung lebih cepat berstatus kawin dan belum kawin dibandingkan laki-laki. Artinya laki-laki secara rata-rata kawin

lebih muda dibandingkan perempuan. Keadaan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat.

Persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai, baik cerai hidup, lebih besar daripada penduduk laki-laki dengan status yang sama. Perempuan berstatus cerai hidup sebesar 3,21 % sedangkan laki-laki sebesar 0,60 %. Untuk cerai mati, perempuan sebesar 11,24% dan laki-laki sebesar 1,90%. Ini berarti bahwa perempuan lebih tahan hidup menjanda dibandingkan laki-laki baik karena perceraian atau karena kematian pasangannya.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>

# BAB IV

## PENDIDIKAN





## BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kebutuhan seluruh elemen masyarakat. Dalam kaitan ini pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar agar seluruh penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh pendidikan yang layak.

Mengingat pentingnya pendidikan dalam pembangunan ekonomi, maka diperlukan usaha-usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengembangkan pendidikan bagi masyarakat baik dari segi kualitas maupun pemerataan pendidikan. Masyarakat juga perlu terus didorong untuk meningkatkan partisipasinya dalam pendidikan.

Upaya peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang baik pada pendidikan dan sumber informasi lain. Dengan tingkat pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.

### 4.1 Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK digunakan untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sejak tahun 2007 penghitungan angka partisipasi kasar juga memperhitungkan pendidikan non formal yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C.

Angka partisipasi kasar dapat memberikan gambaran tentang banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu.

APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Tabel 4.1 APK menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	117,31	100,04	107,93
SMP	100,52	102,80	102,60
SMA	89,15	97,36	86,87
PT	20,62	36,79	28,93

Sumber: BPS Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Nilai APK jenjang pendidikan SD di Tapanuli Tengah pada tahun 2022, baik untuk laki-laki maupun perempuan sudah di atas 100. Nilai APK lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, APK Tapanuli Tengah sebesar 102,60. Jika dibandingkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, APK SMP penduduk perempuan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Sedangkan pada jenjang pendidikan SMA sederajat dan Perguruan Tinggi, APK penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Tapanuli Tengah dalam mengikuti pendidikan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Secara umum partisipasi penduduk Tapanuli Tengah dalam mengikuti pendidikan yang lebih tinggi masih rendah.



Adanya pola angka partisipasi kasar yang semakin rendah seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan salah satunya dipengaruhi oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Selain itu, kondisi sosial ekonomi yang serba pas-pasan masih relatif banyak mendorong pendidikan yang dimiliki pun relatif rendah.

## 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. APM digunakan untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Tabel 4.2 APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin  
Tahun 2022

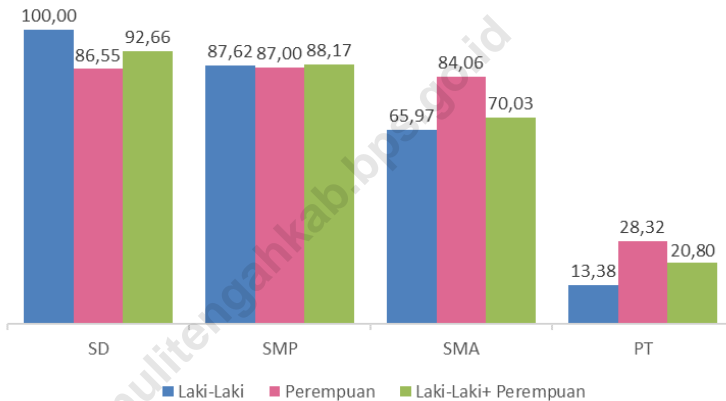
Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	100,00	86,55	92,66
SMP	87,62	87,00	88,17
SMA	65,97	84,06	70,03
PT	13,38	28,32	20,80

Sumber: BPS Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Indikator angka

partisipasi murni dapat memberikan gambaran yang lebih baik daripada angka partisipasi kasar karena indikator ini memberikan gambaran kekonsistenan antara umur penduduk dengan pendidikan yang disarankan untuk usia yang bersangkutan.

Gambar 4.1 APM Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Pada tahun 2022, pada jenjang pendidikan SD, angka partisipasi murni di Tapanuli Tengah sebesar 92,66. Hal ini berarti bahwa dari 100 penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 92 sampai 93 orang sudah mengikuti pendidikan SD sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani pada umur tersebut. Untuk jenjang pendidikan SMP angka partisipasi murni jenjang tersebut pada tahun 2022 adalah sebesar 88,17. Angka ini berarti bahwa pada tahun 2022, dari 100 penduduk usia 13-15 tahun ada sekitar 88 sampai 89 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu SMP. Selanjutnya, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas pada tahun 2022 adalah sebesar 70,03. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2022,

dari 100 penduduk usia 16-18 tahun, ada sekitar 70 orang yang sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu SMA.

Sementara di jenjang pendidikan tinggi angka partisipasi murni pada tahun 2022 sebesar 20,80, artinya dari 100 penduduk usia 19-24 tahun, ada sekitar 20 sampai 21 orang yang sekolah/berkuliah sesuai dengan jenjang pendidikan yang seharusnya dijalani, yaitu Perguruan Tinggi. Berdasarkan gambar 4.2, APM penduduk perempuan lebih besar dibanding APM laki-laki pada setiap jenjang pendidikan kecuali jenjang pendidikan SD dan SMP.

### 4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan penduduk adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat intelektualitas seseorang. Pada pembahasan berikut, pendidikan tertinggi yang ditamatkan dilihat dari ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk. Berdasarkan hasil pendataan Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022, mayoritas penduduk Tapanuli Tengah berpendidikan SMA ke atas.

Pada tahun 2022, persentase penduduk Tapanuli Tengah usia 10 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikan SD adalah sebesar 24,88%. Selanjutnya, yang telah menamatkan pendidikan SMP adalah sebanyak 18,03%, SMA sederajat ke atas sebesar 32,24% dan Diploma/Sarjana sebesar 6,71%.

Persentase penduduk yang telah menamatkan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi yaitu Diploma I dan II sebesar 0,15%; Diploma III sebesar 0,98% dan Diploma IV/S-1 ke atas sebesar 5,58% dari total penduduk usia 10 tahun ke atas di Tapanuli Tengah.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2022

Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Punya Ijazah SD	17,30	19,36	18,34
SD	25,37	24,40	24,88
SMP	17,81	18,26	18,03
SMA ke atas	38,49	29,21	32,24
Diploma I dan II	0,00	0,30	0,15
Diploma III	0,86	1,09	0,98
Diploma IV/S-1 ke atas	3,78	7,37	5,58
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan tinggi (Diploma maupun Sarjana) lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Banyaknya jumlah perempuan yang menamatkan pendidikan akademi dan yang lebih tinggi memberikan gambaran semakin besarnya tuntutan pekerjaan yang membutuhkan perempuan dengan keahlian tertentu. Hal ini membuktikan bahwa kaum perempuan tidak mau ketinggalan untuk menggapai pendidikan gelar sarjana serta memiliki kemauan dan kemampuan yang lebih baik untuk mencapai pendidikan gelar sarjana.

Pendidikan diploma menjadi pilihan utama bagi perempuan karena jurusan-jurusan yang ditawarkan lembaga-lembaga diploma identik dengan pekerjaan perempuan modern seperti perawat, sekretaris, akuntansi, keuangan. Selain itu, program diploma juga mempunyai waktu belajar yang relatif singkat yaitu 1 sampai 3 tahun, selama belajar mahasiswa dapat melakukan praktik bekerja (magang)

dan sesudah menyelesaikan seluruh paket belajar, lulusan program diploma ini dapat langsung bekerja karena praktek dan pengalaman mereka selama kuliah dianggap sesuai dengan pekerjaan yang membutuhkan tenaga terampil dan siap pakai.

Dari tabel 4.3 dapat terlihat juga bahwa masih ada penduduk usia 10 tahun ke atas di Tapanuli Tengah yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak menamatkan sekolah dasar sebanyak 18,34%. Jika dibandingkan, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum bersekolah lebih banyak dibanding laki-laki.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>



# BAB V

## KESEHATAN







## BAB V KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di tiap kecamatan.

Peningkatan derajat kesehatan manusia harus dimulai dari sejak awal seorang manusia masih dalam kandungan. Pendekatan pembangunan kesehatan pada ibu hamil, bayi dan balita dengan pemberian ASI dan imunisasi, anak usia sekolah dan remaja, pasangan usia subur, serta usia lanjut dengan memberikan jaminan sosial. Kebutuhan-kebutuhan pada setiap tahap kehidupan harus terpenuhi agar dapat mencapai kehidupan yang lebih bermartabat. Pendekatan keluarga menjadi sasaran utama untuk mencapai keluarga yang sehat.

Selain itu, paradigma kesehatan harus ditanamkan di masyarakat bahwa kesehatan adalah harta berharga yang harus dijaga. Isu gender dalam bidang kesehatan sangat terkait erat dengan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang

elayanan kesehatan dan program/ kebijakan kesehatan. Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Selain itu, hal pokok yang juga harus diperhatikan adalah perluasan akses, khususnya kepada rakyat miskin dan perempuan di seluruh desa/kelurahan. Akses merupakan hal yang sangat terkait dengan isu gender. Derajat kesehatan perempuan secara umum dapat diukur melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti tenaga kesehatan terutama bidan, selain itu dipengaruhi juga oleh rata-rata usia harapan hidup, jumlah akseptor KB, serta angka kematian bayi yang secara langsung terkait dengan tingkat kesehatan ibu. Ketersediaan fasilitas kesehatan di Tapanuli Tengah dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Jumlah Fasilitas Kesehatan di Tapanuli Tengah Tahun 2020

Fasilitas Kesehatan	Jumlah (Unit)
(1)	(2)
Rumah Sakit	1
Puskemas	25
Puskesmas Pembantu (Pustu)	83
Poliklinik/Balai Pengobatan	20
Tempat Praktek Dokter	34
Tempat Praktek Bidan	224
Poskesdes	23
Polindes	122
Apotek	13
Toko Khusus Obat/Jamu	47

Sumber: BPS Kab. Tapanuli Tengah (Pendataan *Updating* Potensi Desa 2020)

## 5.1 Angka Morbiditas

Angka kesakitan/morbiditas (*Morbidity Rate*) adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Tabel 5.2 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022

Jenis Kelamin (1)	Persentase (2)
Laki-Laki	10,34
Perempuan	10,28
Laki-Laki + Perempuan	10,31

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, 10,31% penduduk mengalami keluhan sakit selama sebulan terakhir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Jika dibandingkan, penduduk laki-laki lebih banyak yang sakit dibanding penduduk perempuan selama tahun 2022.

## 5.2 Fasilitas Tempat Melahirkan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya AKI adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan pada saat melahirkan. Pemilihan

tempat untuk melahirkan memiliki dampak yang besar pada pengalaman persalinan sang ibu. Faktor pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi menjadi penyebab dasar pemilihan tempat bersalin.

Tabel 5.3 Persentase Wanita Usia 15-49 yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Fasilitas Tempat Melahirkan Anak Terakhir, Tahun 2022

Fasilitas Kesehatan (1)	Persentase (2)
RS Pemerintah/ Swasta/ RSIA	40,75
Rumah Bersalin/ Klinik	19,70
Puskesmas	14,21
Pustu	0,00
Praktek Nakes	13,52
Polindes/ Poskesdes	0,00
Rumah	4,99
Lainnya	6,83

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Berdasarkan hasil Susenas 2022 pada tabel 5.3, pada tahun 2022 mayoritas ibu di Kabupaten Tapanuli Tengah melahirkan di Puskesmas Rumah Sakit Pemerintah/ Swasta/ RSIA (40,75%). dilanjutkan dengan Rumah Bersalin/ Klinik (19,70%) dan Puskesmas (14,21%).

Sementara itu, persentase ibu yang melahirkan di rumah masih terbilang cukup banyak yakni 4,99% atau dengan kata lain dari 100 orang ibu, 4 sampai 5 orang ibu memilih melahirkan dirumah dibanding melahirkan di fasilitas kesehatan. Berbagai faktor, baik eksternal maupun internal menjadi pertimbangan bagi para ibu memilih rumah sebagai tempat bersalin. Beberapa faktor eksternal yang memengaruhi diantaranya adalah pengaruh norma, budaya, atau agama. Sementara dari sisi faktor internal seperti misalnya

keinginan untuk melahirkan didalam lingkungan yang akrab dengan dikelilingi oleh orang-orang tercinta. Hal tersebut tentunya tidak menjadi masalah jika kehamilan yang dialami tidak pernah mengalami riwayat melahirkan yang sulit. Walaupun risiko yang terjadi saat melahirkan tidak terprediksi.

### 5.3 Penolong Persalinan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan yang tidak kalah pentingnya adalah penolong persalinan bayi. Hal ini berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan. Data mengenai penolong persalinan menjadi sangat penting karena penolong kelahiran sangat mempengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan. Persalinan yang ditolong oleh dokter dan bidan dipandang lebih baik dari segi kesehatan dibandingkan persalinan yang ditolong oleh dukun atau tenaga nonmedis lainnya.

Masyarakat tradisional memiliki kecenderungan menggunakan tenaga dukun dalam membantu proses persalinannya dengan peralatan yang digunakan sederhana dan tidak steril sehingga sangat berbahaya dalam proses persalinan. Di masa sekarang ini, pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar pada masalah kesehatan khususnya dalam hal penurunan angka kematian bayi. Banyak hal yang telah dilakukan guna menurunkan angka kematian bayi, diantaranya dengan menyediakan tenaga bidan sampai tingkat desa (yang dikenal dengan bidan desa) dan pemberian pelatihan kepada dukun tentang cara penanganan persalinan yang sesuai dengan standar medis.

Tabel 5.4 Persentase Wanita Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, Tahun 2022

Fasilitas Kesehatan	Persentase
(1)	(2)
Dokter Kandungan	37,22
Dokter Umum	7,93
Bidan	54,84
Perawat	0,00
Dukun Beranak/Paraji	0,00
Lainnya	0,00

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Tabel 5.4 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2022 persentase persalinan dengan ditolong oleh bidan menduduki peringkat pertama, sebanyak 69,37% persalinan dibantu oleh bidan. Selanjutnya, sebanyak 54,84% penolong persalinan dilakukan oleh dokter kandungan. Penolong persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis lainnya seperti perawat, dukun beranak/paraji atau lainnya tidak ada. Hal ini memberikan gambaran bahwasanya kesadaran masyarakat sudah cukup baik akan peran pentingnya penolong tenaga medis dalam persalinan. Hal ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Kabupaten Tapanuli Tengah dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.

## 5.4 Lama Pemberian ASI

Air Susu Ibu (ASI) mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan anak sejak dilahirkan. Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan terbaik untuk bayi. Banyak keunggulan ASI yang tidak dapat digantikan oleh susu lainnya seperti mengandung lebih banyak gizi dan paling sempurna untuk pertumbuhan anak, dapat menjaga kekebalan tubuh anak sehingga anak lebih kebal terhadap berbagai penyakit, dan yang jelas lebih hemat dan ekonomis.

Kebijakan pemerintah melalui Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian dianjurkan untuk tetap diberikan berdampingan dengan makanan padat sampai usia 2 tahun atau lebih.

Tabel 5.5 Persentase Baduta yang Pernah Disusui Menurut Lamanya Pemberian ASI dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Lamanya Disusui (Bulan)	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 5	39,68	21,67	31,54
6 - 23	60,32	78,33	68,46
<b>Rata-Rata Pemberian ASI (bulan)</b>	8,79	12,76	10,59

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenat Maret 2022)

Rata-rata lamanya pemberian ASI kepada balita (bayi dibawah lima tahun) di Tapanuli Tengah berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2022 sekitar 10 sampai 11 bulan. Kondisi ini masih jauh di bawah anjuran pemerintah yang menganjurkan pemberian ASI sampai dengan usia anak 2 tahun atau lebih dengan masa ASI eksklusif adalah 6 bulan.

Kesadaran para ibu di Tapanuli Tengah untuk memberikan ASI secara optimal kepada baduta masih tergolong rendah. Mayoritas

ibu di Tapanuli Tengah hanya memberikan ASI pada balitanya selama 6-23 bulan yaitu sebanyak 68,46%. Pada tahun 2022, bayi laki-laki disusui selama 0-5 bulan oleh ibunya sekitar 39,68%, lebih besar dari bayi perempuan sebesar 21,67%. Berbanding terbalik dengan bayi yang laki-laki yang disusui oleh ibunya selama 6-23 bulan sebesar 60,32%, lebih kecil dari bayi perempuan sebesar 78,33%.

Hal-hal yang mungkin menjadi faktor penyebabnya salah satunya adalah pengetahuan sang ibu tentang menyusui masih kurang. Pengetahuan sekitar menyusui yaitu yang meliputi cara menyusui yang benar, tentang cara menyimpan ASIP, cara perawatan payudara, posisi menyusui yang benar dan informasi/nasihat yang sudah pernah diterima ibu, baik sebelum persalinan maupun pascapersalinan oleh tenaga kesehatan (nakes). Keberhasilan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan penuh tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), yaitu pemberian ASI segera setelah proses persalinan selesai. Inisiasi Menyusui Dini memberikan kesempatan pada bayi untuk mulai menyusu dengan segera setelah bayi dilahirkan. Salah satu manfaat dari inisiasi dini untuk bayi adalah dapat menghindari dan mengurangi stress pada bayi. Dengan inisiasi tersebut bayi jauh lebih tenang dan denyut jantungnya lebih stabil. Selain itu, dampak dari pemberian ASI pada jam-jam pertama melahirkan dapat menekan angka kematian bayi pada saat beberapa bulan kehidupan pertamanya. Inisiasi menyusui dini merupakan langkah awal untuk memberikan ASI secara eksklusif pada bayi.

Proses inisiasi menyusui dini dimulai dengan meletakkan bayi di dada ibu setelah lahir. Hal tersebut bisa meningkatkan ikatan batin ibu dan anak karena ada kontak fisik secara langsung. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2021, mayoritas ibu di Tapanuli Tengah mulai meletakkan bayi di dada setelah melahirkan dilakukan kurang dari satu jam setelah melahirkan yaitu sebesar 79,01%. Sementara



lamanya proses menempelkan bayi baru lahir di dada ibu mayoritas adalah kurang dari satu jam yaitu sebanyak 87,81%.

Tabel 5.6 Persentase Wanita Usia Subur berstatus Pernah Kawin Menurut Lamanya Inisiasi Menyusui Dini Anak Terakhir Tahun 2021

IMD	Persentase
(1)	(2)
% Inisiasi Menyusui Dini	63,34
<b>Saat mulai diletakkan di dada ibu setelah dilahirkan</b>	
< 1 jam	79,01
>= 1 jam	20,99
<b>Lama proses menempelkan bayi baru lahir di dada ibu</b>	
< 1 jam	87,81
>= 1 jam	12,19

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2021)

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan mengenai ASI eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk menjamin tercapainya target ASI eksklusif yang telah ditetapkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 450/MENKES/IV/2004 tanggal 7 April 2004 menekankan pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia selama 6 bulan dan menargetkan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen. Dalam peraturan ini juga ditetapkan bahwa tenaga kesehatan harus menginformasikan pemberian ASI eksklusif kepada ibu dengan mengacu pada 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui. Pada Tahun 2012, pemerintah telah membuat dasar regulasi peraturan pendukung ASI yang diatur dalam PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif.

Faktor lain yang berhubungan dengan keberhasilan pemberian ASI kepada bayi adalah faktor dukungan keluarga terutama dari

suami. Sebuah penelitian mengatakan ibu yang suaminya mendukung pemberian ASI eksklusif berpeluang memberikan ASI eksklusif 2 (dua) kali daripada ibu yang suaminya tidak mendukung pemberian ASI eksklusif. Pada pasal 2 PP Nomor 33 tahun 2012 disebutkan bahwa pengaturan pemberian ASI eksklusif salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI eksklusif.

## 5.5 Pemberian Imunisasi

Selain penolong persalinan dan pemberian ASI, yang tak kalah penting dalam menjaga kesehatan balita dan mengurangi angka kematian bayi dan balita adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan salah satu upaya preventif untuk mencegah penyakit melalui pemberian kekebalan tubuh yang dilaksanakan terus-menerus, menyeluruh, dan sesuai standar sehingga mampu memberikan perlindungan kesehatan dan memutuskan rantai penularan penyakit. Beberapa imunisasi pokok dan wajib untuk diberikan kepada anak yang dianjurkan oleh pemerintah untuk anak balita adalah:

- Imunisasi Polio, bertujuan untuk melindungi tubuh dari serangan virus polio, yaitu virus yang dapat menyebabkan kelumpuhan, sesak napas, dan terkadang kematian. Vaksin ini diberikan 5 kali yaitu pada saat bayi baru lahir, 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan dan 15 bulan.
- Imunisasi Campak, bertujuan untuk melindungi dari virus campak, yaitu penyakit virus yang menyebabkan demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, radang mata, dan ruam. Vaksin campak diberikan pada saat anak berusia 9 bulan, dua tahun dan enam tahun.
- Imunisasi DPT atau singkatan dari Difteri, Pertusis dan Tetanus, bertujuan untuk memberi kekebalan terhadap penyakit difteri,

pertusis dan tetanus. Difteri merupakan penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan sesak napas, radang paru-paru, hingga masalah pada jantung dan kematian. Pertusis lebih dikenal dengan sebutan batuk rejan. Sedangkan Tetanus merupakan penyakit kejang dan kaku otot yang sama mematikannya. Pemberian imunisasi DPT dilakukan 5 (lima) kali yaitu pada saat anak berusia dua bulan, tiga bulan, empat bulan, satu setengah tahun, dan lima tahun.

- Imunisasi BCG, untuk memberikan kekebalan terhadap kuman TBC, yaitu kuman yang dapat menyebabkan penyakit tuberkulosis. Penyakit ini merupakan penyakit serius yang dapat ditularkan melalui hubungan dekat dengan orang yang terinfeksi TB, seperti hidup di rumah yang sama. Vaksin ini diberikan hanya satu kali, yaitu pada saat anak baru dilahirkan hingga berusia 2 bulan.
- Imunisasi Hepatitis B (HB), yang bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap agen hepatitis. Hepatitis B merupakan salah satu penyakit infeksi hati berbahaya yang disebabkan oleh virus melalui cairan tubuh dan darah. Biasanya diberikan pada saat anak berusia 2 tahun dan diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak waktu sekitar 6-12 bulan.

Berdasarkan hasil pendataan Susenas Maret 2021, mayoritas balita di Tapanuli Tengah sudah pernah diimunisasi (81,18%). Namun, pemberian imunisasi yang pokok dan wajib diberikan sesuai anjuran pemerintah yaitu BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B di Tapanuli Tengah masih belum memenuhi target cakupan imunisasi dasar lengkap yaitu sebesar 92%. Hasil Susenas Maret 2020 menunjukkan bahwa masih 76% balita yang sudah diimunisasi BCG, 78% sudah mendapat imunisasi polio, mendapat imunisasi DPT sebanyak 71% dan Hepatitis B sebanyak 61%. Menurut

Kementerian Kesehatan, beberapa alasan yang membuat para ibu tidak melakukan imunisasi pada balitanya antara lain:

- a. Kurangnya informasi
  - Kurang menyadari kebutuhan untuk imunisasi
  - Kurang menyadari kebutuhan kembali untuk diimunisasi
  - Tidak tahu tempat atau jadwal imunisasi
  - Takut efek samping
  - Anggapan salah tentang kontra indikasi
- b. Kurang motivasi
  - Menunda di lain waktu
  - Tidak percaya imunisasi
  - Desas desus tentang imunisasi

Selain imunisasi dasar yang bersifat wajib, ada juga jenis imunisasi yang bersifat alternatif, yang merupakan imunisasi lanjutan dari imunisasi dasar, salah satunya adalah imunisasi MMR. Imunisasi MMR merupakan pemberian vaksin MMR yang merupakan vaksin kombinasi. Vaksin ini merupakan gabungan antara vaksin campak, gondong dan campak Jerman. Imunisasi MMR diberikan sebanyak dua kali, yaitu saat anak berusia satu tahun tiga bulan dan saat anak berusia 15-18 bulan dengan minimal jarak 6 bulan dengan pemberian imunisasi campak. Pemberian berikutnya adalah saat anak berusia 6 tahun.

Terkait dengan imunisasi lanjutan, Kementerian Kesehatan telah mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar lengkap dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Tabel 5.7 Persentase Balita menurut Jenis Imunisasi yang Pernah Diberikan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2022

Jenis Imunisasi	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
BCG	86,22	80,93	85,38
POLIO	79,10	76,26	77,69
DPT	80,30	71,08	75,70
HB	78,49	65,38	71,95
CAMPAK/MMR	64,79	58,34	61,58
<b>% Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap</b>	45,26	39,00	42,14

Sumber: BPS Tapanuli Tengah (Susenas Maret 2022)

Hasil Susenas 2022 menunjukkan bahwa persentase balita di Tapanuli Tengah yang telah diberi imunisasi Campak/MMR paling rendah dibandingkan jenis imunisasi yang lain (61,58%). Balita yang diberi imunisasi Campak/MMR berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita berjenis kelamin Perempuan. Imunisasi MMR masih belum menjadi target utama para ibu di Tapanuli Tengah untuk diberikan kepada balitanya karena imunisasi MMR memang belum menjadi imunisasi wajib yang harus diberikan kepada balita. Balita yang diberi imunisasi Campak/MMR berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan balita berjenis kelamin Perempuan.

Adapun persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap di Kabupaten Tapanuli Tengah tergolong rendah yang hanya mencapai 42,14%. Untuk mencapai terbentuknya kekebalan masyarakat yang tinggi, dibutuhkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan yang tinggi dan merata di seluruh wilayah, bahkan sampai tingkat desa. Bila tingkat kekebalan masyarakat tinggi, maka yang

akan terlindungi bukan hanya anak-anak yang mendapatkan imunisasi tetapi juga seluruh masyarakat.

Dalam rangka mencapai cakupan imunisasi yang tinggi dan merata di setiap wilayah, Menteri Kesehatan mengimbau kepada seluruh Kepala Daerah agar (1) mengatasi dengan cermat hambatan utama di masing-masing daerah dalam pelaksanaan program imunisasi; (2) menggerakkan sumber daya semua sektor terkait termasuk swasta; dan (3) meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi rutin lengkap sehingga mau dan mampu mendatangi tempat pelayanan imunisasi.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>

# BAB VI

## PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK







## **BAB VI**

### **PEREMPUAN DI SEKTOR PUBLIK**

Pembahasan mengenai kiprah perempuan di sektor publik bukan merupakan hal yang baru untuk diperbincangkan. Jika pada zaman dulu, ketika perempuan bekerja di ranah publik, seringkali menjadi pembicaraan di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila laki-laki bekerja di ranah domestik, tidak demikian dengan sekarang. Seiring berjalannya waktu, perbedaan jenis kelamin sebagai dasar pembedaan pembagian kerja sudah mulai hilang. Dewasa ini banyak perempuan yang sudah mulai dapat menunjukkan kemampuan dan perannya di sektor publik, terutama di sektor ekonomi. Bahkan kini mereka sudah bisa mensejajarkan kedudukannya dengan laki-laki.

Perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, terlihat pada peran perempuan di jabatan-jabatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terlepas dari persamaan kesempatan yang diberikan perempuan pada masa sekarang, peran seorang perempuan di sektor domestik tetap tidak dapat ditinggalkan. Hal tersebut menimbulkan peran ganda yang harus dilakoni seorang perempuan, yaitu di sektor publik (pekerjaan) dan di sektor domestik (rumah). Dengan status peran ganda tersebut, sedikit banyak menimbulkan dampak terhadap kehidupan perempuan itu sendiri, yaitu dampak positif dan sekaligus dampak negatif.

Dampak positif yang terjadi adalah terbantunya perekonomian rumah tangga, selain juga sebagai pembuktian bagi perempuan itu sendiri bahwa dia mampu menunjukkan eksistensinya di sektor publik. Idealisme seorang perempuan juga dapat tersalurkan dengan menjalani perannya di sektor publik. Sebaliknya, dampak negatif yang mungkin terjadi adalah adanya konflik antara peran pekerjaan dan peran keluarga, tuntutan adanya waktu dan tenaga ekstra, adanya persaingan (yang mungkin tidak diakui) antara suami dan

isteri, dan jika keluarga itu mempunyai anak-anak, perhatian terhadap anak menjadi lebih berkurang.

## 6.1 Bidang Legislatif dan Yudikatif

Berdasarkan tabel 6.1 menunjukkan komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022. Proporsi anggota DPRD Tapanuli Tengah, 82,86% beranggotakan laki-laki. Seluruh fraksi yang ada, hanya 3 fraksi saja yang mempunyai wakil rakyat perempuan yaitu dari Fraksi Nasdem, Golkar, dan PDI Perjuangan.

Tabel 6.1 Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Fraksi Tahun 2022

Fraksi	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Fraksi Nasdem	11	3	14
Fraksi Golkar	3	1	4
Fraksi PDI Perjuangan	2	2	4
Fraksi Gerindra	3	0	3
Fraksi Demokrat	3	0	3
Fraksi Perindo	3	0	3
Fraksi Bintang Amanat Sejahtera/Gabungan	4	0	4
<b>Jumlah</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>35</b>

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2008 pasal 2 disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu

perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Sementara dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 pasal 8 diatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD memuat ketentuan tentang kebijakan afirmasi untuk keterwakilan perempuan. Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok/golongan tertentu (dalam hal ini adalah kaum perempuan) untuk memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.

Keanggotaan perempuan dalam anggota dewan yang duduk di lembaga legislatif merupakan salah satu bentuk persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menyuarakan haknya. Keberadaan mereka diharapkan dapat menyuarakan aspirasi yang pro terhadap kepentingan perempuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan.

Seperti halnya perempuan yang menduduki jabatan-jabatan di lembaga legislatif, jumlah perempuan yang berkarir dan menduduki jabatan strategis di lembaga yudikatif juga masih tergolong rendah. Di lembaga peradilan misalnya, hakim yang memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan suatu perkara masih lebih banyak hakim laki-laki daripada hakim perempuan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pada Pengadilan Negeri pada tahun 2017 hakim laki-laki berjumlah 6 (enam) orang, sedangkan hakim perempuan hanya 1 (satu) orang saja. Tahun 2018, hakim laki-laki menurun menjadi 5 (lima) orang dan hakim perempuan tetap 1 (satu) orang. Sama dengan kondisi tahun 2018 dan 2019, jumlah hakim perempuan masih 1 (satu) orang. Namun pada tahun 2020, jumlah hakim laki-laki

sama dengan hakim perempuan yaitu sebanyak 5 (lima) orang. Pada 2021 jumlah hakim laki-laki bertambah menjadi 6 (enam) orang, sedangkan hakim perempuan berkurang menjadi 4 (empat) orang. Sama halnya dengan tahun 2022, hakim perempuan mengalami penurunan menjadi 3, sedangkan hakim laki-laki tetap 6 orang sehingga proporsi hakim perempuan hanya 33,33% dari total jumlah hakim.

Tabel 6.2 Jumlah Hakim di Kabupaten Tapanuli Tengah Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017 - 2022

Tahun	Pengadilan Negeri		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	6	1	7
2018	5	1	6
2019	3	1	4
2020	5	5	10
2021	6	4	10
2022	6	3	9

Sumber : Pengadilan Negeri Sibolga

Dunia dan pekerjaan hakim dan jaksa tidak sempurna bila tidak melibatkan aparat kepolisian. Sinergi hakim, jaksa dan polisi merupakan sistem yang harus dibangun untuk menegakkan keadilan, mendorong masyarakat memahami hak dan kewajibannya secara seimbang dan menumbuhkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan aparat kepolisian sangat diperlukan untuk menjamin keamanan di setiap sudut kota. Selain memberi rasa aman, kehadiran polisi di tengah masyarakat juga dapat menjadi indikator dinamisnya gerak hidup masyarakat.

## 6.2 Bidang Ekonomi

Keterlibatan penduduk dalam perekonomian dimulai dari adanya usaha untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki serta sesuai dengan pekerjaan yang diinginkan. Keterlibatan penduduk dalam ketenagakerjaan dapat direfleksikan dari jumlah angkatan kerja dan banyaknya penduduk yang bekerja.

Tabel 6.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kegiatan Seminggu yang Lalu	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angkatan Kerja</b>	115.753	94.388	210.141
Bekerja	105.596	87.791	193.387
Pengangguran Terbuka	10.157	6.597	16.754
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	21.333	43.198	64.531
Sekolah	8.825	8.678	17.503
Mengurus Rumah Tangga	6.257	30.931	37.188
Lainnya	6.251	3.589	9.840

Sumber : BPS Kab. Tapanuli Tengah (Sakernas Agustus 2022)

Perbandingan jumlah Angkatan Kerja terhadap jumlah Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) atau yang diistilahkan sebagai TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) di Tapanuli Tengah tahun 2022 yakni 76,51. Jika dibandingkan, TPAK laki-laki (84,44) lebih besar dibanding TPAK perempuan (68,60). Hal ini sejalan dengan penduduk perempuan yang termasuk usia kerja masih banyak yang termasuk kedalam kategori bukan angkatan kerja yakni masih bersekolah atau mengurus rumah tangga, atau melakukan

kegiatan lainnya selain bekerja, sekolah, dan mengurus rumah tangga.

Pada kategori penduduk angkatan kerja, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dari jumlah penduduk perempuan. Namun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk laki-laki (8,77) lebih tinggi dibanding TPT perempuan (6,99). Dari data tersebut, terlihat bahwa penduduk laki-laki yang mengganggu lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan di Tapanuli Tengah. Penyerapan pekerja laki-laki tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja laki-laki. Sedangkan untuk penduduk perempuan yang turut berpartisipasi dalam bidang perekonomian dengan bekerja, sebagian besar tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya.

### 6.3 Bidang Pemerintahan

Suatu daerah akan mencapai kemajuan di berbagai bidang bila program-program yang telah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik. Roda pembangunan akan dapat berjalan dengan lancar jika memiliki pemerintah yang dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam melaksanakan program-program yang ada tentunya dibutuhkan personel yang berkualitas baik dari ilmunya maupun kemampuannya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu personel yang menjadi kunci berjalannya pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan di suatu daerah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan di segala bidang, harus memerhatikan sektor-sektor yang langsung melayani masyarakat umum. Salah satunya adalah PNS yang ditugaskan untuk melayani masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 6.4 Jumlah PNS menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022

Jabatan (1)	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	29	8	37
Administrator	115	61	176
Pengawas	193	147	340
Jabatan Fungsional Guru	479	1.329	1.808
Jabatan Fungsional Medis	103	723	826
Jabatan Fungsional Teknis	129	106	235
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana	603	710	1.313
<b>Jumlah</b>	<b>1.651</b>	<b>3.084</b>	<b>4.735</b>

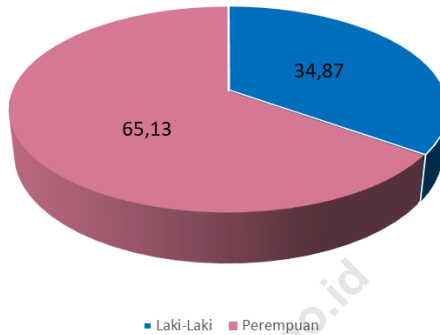
Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), pada tahun 2022 banyaknya PNS menurut jenis kelamin secara keseluruhan lebih banyak perempuan yaitu sebanyak 3.084 orang (65,13%) sementara laki-laki hanya 1.651 orang (34,87%). Mayoritas PNS di Tapanuli Tengah menduduki Jabatan Fungsional Guru sebanyak 1.808 orang.

Dominasi PNS perempuan ada pada Jabatan Fungsional Guru sebesar 1.329 orang (2,77 kali dari laki-laki), Jabatan Fungsional Medis sebesar 723 orang (7,02 kali dari laki-laki) dan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sebesar 710 orang (1,28 kali dari laki-laki).

Dominasi PNS laki-laki ada pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebesar 29 orang (3,63 kali dari perempuan), Administrator sebesar 115 orang (1,89 kali dari perempuan), Pengawas sebesar 193 orang (1,31 kali dari perempuan) dan Jabatan Fungsional Teknis sebesar 129 orang (1,22 kali dari perempuan).

Gambar 6.1 Persentase PNS menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



Sumber: Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Untuk melihat kualitas dari pegawai yang ada dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Mayoritas PNS otonom di Tapanuli Tengah berpendidikan Diploma/Sarjana/Doktor (81,68%). Pegawai dengan pendidikan SMA ada sebanyak 17,28%. Sementara yang berpendidikan dibawah SMA hanya sekitar 1,04%.

Tabel 6.5 Banyaknya PNS Daerah Otonom Pemerintah Daerah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
SD Sederajat	11	0	11
SMP Sederajat	26	2	28
SMA Sederajat	345	406	751
Diploma I/II/III	168	835	1.003
Diploma IV/S1	990	1.774	2.764
S2/Pasca Sarjana	110	67	177
S3/Doktor/Ph.D	1	0	1
<b>Jumlah</b>	<b>1.651</b>	<b>3.084</b>	<b>4.890</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Nasional



# BAB VII

## PEMBANGUNAN GENDER





## BAB VII

### PEMBANGUNAN GENDER

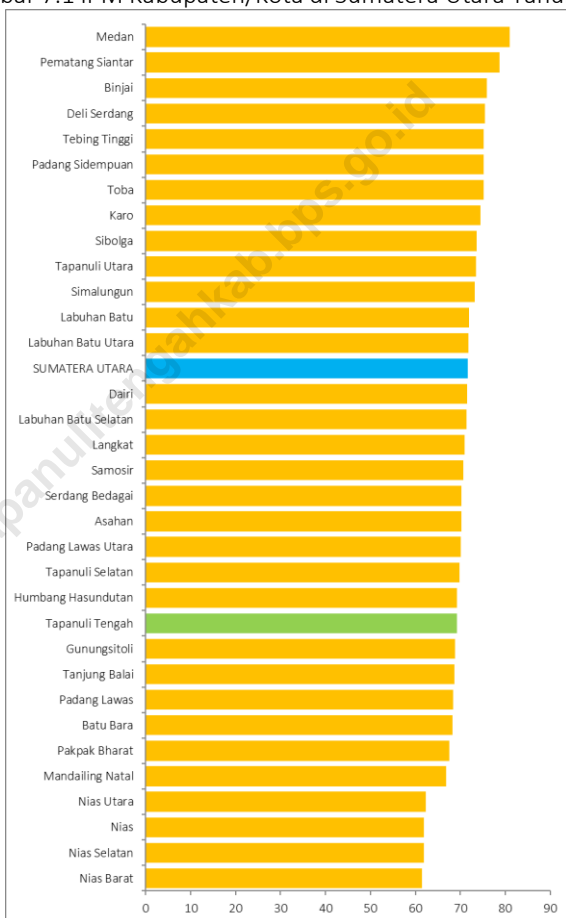
Pembangunan di suatu wilayah sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang tersedia di wilayah tersebut, sehingga pembangunan itu sendiri tidak bisa lepas dari pembangunan manusia. Pembangunan manusia yang dimaksudkan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, namun juga mencakup aspek kualitas hidup dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, pembangunan manusia juga mencakup perluasan akses untuk memperoleh berbagai peluang dan pilihan untuk seluruh penduduk.

Berdasarkan UNDP (1990), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya. Beberapa hal yang esensial dalam pembangunan manusia diantaranya ditujukan agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak. Menurut Alkire (2010), tujuan dari pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk hidup panjang, sehat dan kreatif.

Pembangunan Manusia di suatu wilayah atau negara dapat dihitung melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM sendiri diperkenalkan pertama kali oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun berdasarkan pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang luas dan terkait banyak faktor.

Nilai IPM Kabupaten Tapanuli Tengah yakni 70,31 yang masuk kategori IPM tinggi. Angka ini masih lebih rendah dari IPM Provinsi Sumatera Utara dengan nilai IPM 72,71. Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, nilai IPM Kabupaten Tapanuli Tengah berada di urutan 23, turun 1 peringkat dari tahun lalu.

Gambar 7.1 IPM Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Kab. Tapanuli Tengah

Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Tabel 7.1 Komponen Pembentuk IPM

Dimensi Dasar	Komponen	Satuan	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Umur panjang dan hidup sehat	Usia harapan hidup (saat lahir)	tahun	67,24	67,58
	Harapan lama sekolah	tahun	13,07	13,24
Pengetahuan	Rata-rata lama sekolah	tahun	8,84	8,86
	Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan)	ribu rupiah/orang/tahun	10,138	10,495
Standar hidup layak				
<b>IPM</b>			<b>69,61</b>	<b>70,31</b>

Sumber: BPS Tapanuli Tengah

Umur harapan hidup saat lahir di Tapanuli Tengah mencapai 67,58. Angka ini menunjukkan rata-rata bayi yang lahir tahun 2022 memiliki peluang untuk dapat bertahan hidup sekitar 67 sampai 68 tahun. Dari sisi pendidikan, secara rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Tapanuli Tengah telah menempuh pendidikan hingga 8,86 tahun atau setara dengan kelas 3 SLTP/Sederajat. Sementara anak berusia 7 tahun yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 13,24 tahun atau mencapai perguruan tinggi. Pada aspek ekonomi, rata-rata pengeluaran mencapai 10,495 juta rupiah per kapita per tahun. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Selanjutnya, agar ukuran IPM juga dapat digunakan untuk membandingkan capaian pembangunan berbasis gender, maka UNDP mengembangkan *Gender Development Index* atau Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebagai turunan IPM. IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin rendah capaian kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki.

Pada tahun 2022, nilai Indeks Pembangunan Gender Tapanuli Tengah yakni 94,95. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Sumatera Utara (91,06). Jika dibandingkan, tingkat IPM perempuan Tapanuli Tengah masih dibawah tingkat IPM laki-laki. IPM laki-laki sudah masuk dalam kategori pencapaian tinggi (antara 70 sampai dengan 80), sedangkan IPM perempuan masih dalam taraf sedang (antara 60 sampai dengan 70).

Tabel 7. 2 IPM menurut Jenis Kelamin dan IPG Tahun 2022  
Tapanuli Tengah

Komponen	Satuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia harapan hidup (saat lahir)	tahun	65,44	69,52
Harapan lama sekolah	tahun	13,09	13,66
Rata-rata lama sekolah	tahun	9,17	8,68
Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan)	ribu rupiah/orang/tahun	13.945	10.004
<b>IPM</b>		73,46	69,75
<b>IPG</b>		94,95	

Sumber: BPS RI

Pada aspek kesehatan, nilai umur harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal sangat terkait dengan *female*

*advantages (FA)*, terutama faktor biologis dan tingkah laku atau kebiasaan dari setiap gender. Berdasarkan pada Lemaire (2002), secara biologis perempuan memiliki gen dan hormon yang menguntungkan untuk hidup lebih lama. Sedangkan dari segi gaya hidup, laki-laki lebih memiliki risiko kematian yang lebih tinggi karena stres, kebiasaan merokok, dan pekerjaan berat. Namun demikian, secara kenyataan di beberapa wilayah, *female advantages* lebih kecil sebagai akibat tindakan diskriminasi, kekerasan, dan budaya yang menyebabkan rendahnya peluang akses perempuan dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan tabel 7.2, dapat terlihat bahwa UHH (Usia Harapan Hidup) saat lahir penduduk perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Meskipun UHH perempuan lebih besar dari laki-laki, namun dari aspek kesehatan yang lain seperti morbiditas dan keluhan kesehatan, perempuan masih di atas laki-laki, sebagaimana telah disajikan pada bab sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang, tetapi perempuan lebih rentan dalam mengalami sakit. Hal ini terkait dengan karakter fisik perempuan yang secara umum lebih lemah dibandingkan laki-laki. Dari aspek pendidikan, jika diperhatikan rata-rata lama sekolah perempuan perlu ditingkatkan. Bila dibandingkan, rata-rata lama sekolah perempuan masih dibawah laki-laki.

Kesetaraan gender juga dapat dilihat dari ada tidaknya perbedaan capaian perempuan dan laki-laki dalam perekonomian. Dalam konteks kesetaraan gender, indikator yang dapat menunjukkan ada tidaknya perbedaan adalah data upah dan pendapatan perkapita. Namun karena masalah ketersediaan data upah dan pendapatan perkapita, maka indikator ini kemudian digantikan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan sebagai proksi.

Adapun dari hasil Susenas Maret 2022, pengeluaran per kapita perempuan masih jauh dibawah laki-laki. Selisih pengeluaran per kapita laki-laki dengan perempuan sekitar 3,941 juta rupiah per tahun. Hal ini mengindikasikan kontribusi perempuan di bidang ekonomi masih jauh lebih rendah dibanding laki-laki. Meskipun dari data yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, yakni penduduk perempuan yang termasuk

angkatan kerja dan berstatus bekerja cukup banyak, namun status pekerjaan mereka masih banyak sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Meskipun demikian, secara umum pembangunan gender di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah membaik bahkan mencapai nilai IPG yang lebih tinggi dibanding IPG Provinsi Sumatera Utara secara umum.

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id>



# BAB VIII

## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN





## **BAB VII**

### **KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN**

Kekerasan terhadap perempuan menjadi satu topik bahasan yang sedang banyak diperbincangkan oleh kalangan masyarakat luas, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga akademisi saat ini. Hal tersebut terjadi karena dilatarbelakangi oleh adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin.

Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender adalah perbedaan peran dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. "Hak istimewa" yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai "barang" milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan

Kekerasan yang dialami perempuan di area publik sesungguhnya mencerminkan adanya penguasaan laki-laki terhadap perempuan. Data akurat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan terutama dalam rumah tangga sulit diperoleh, karena pada umumnya perempuan atau keluarga tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

Kekerasan di dalam rumah tangga sering dianggap sebagai urusan rumah tangga antara suami dan istri sehingga ini menjadi aib keluarga yang secara nilai-nilai norma budaya sangat tabu untuk diungkapkan keluar apalagi sampai kepada pihak yang berwajib. Menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada saat ini undang-undang tersebut masih dalam tahap sosialisasi ke berbagai segmen masyarakat, baik pada organisasi-organisasi perempuan, pemuka masyarakat, pemuka agama maupun pada penegak hukum itu sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut sangat terkait dengan berlangsungnya budaya patriarki yang mempengaruhi relasi gender yang timpang.

Tabel 8.1 Jumlah Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan/Tindak Kejahatan di Tapanuli Tengah Tahun 2021

Jenis Kasus (1)	Jumlah Korban (2)
Perkosaan	0
Pencabulan	59
KDRT	32

Sumber : Polres Kab. Tapanuli Tengah

Tindak kejahatan yang paling sering menimpa kaum perempuan yakni kasus pencabulan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masing-masing sebanyak 59 orang dan 32 orang. Tindak kekerasan dan pencabulan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk bias gender yang terjadi di masyarakat. Kekerasan dan pelecehan seksual (pencabulan) terhadap perempuan yang terjadi diasumsikan karena faktor berlangsungnya budaya patriarki yang berimplikasi kepada stigma-stigma yang melekat baik kepada laki-laki maupun perempuan. Dalam budaya ini, laki-laki dianggap

kuat dan berkuasa, sehingga berstatus superior. Sebaliknya sosok perempuan dianggap lemah dan dikuasai, tergantung kepada suami sehingga berstatus inferior.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu isu yang tidak bisa lagi dianggap sebagai isu terbelakang. Perlu adanya keseriusan seluruh komponen pemerintah dan masyarakat sipil dalam mengatasi kasus ini. Tindakan penanganannya harus lebih intensif dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak. Dalam pengelolaannya, perlu lebih dipacu upaya mengatasi akar penyebab, bukan hanya akibat atau gejala dari permasalahan tersebut. Selain itu, perlu payung hukum yang jelas dalam hal perlindungan perempuan khususnya dalam bentuk peraturan daerah sehingga edukasi masalah gender ini dapat lebih digiatkan.





**ST2023**  
SENSUS PERTANIAN

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# DATA



## MENCERDASKAN BANGSA

*Enlighten The Nation*




**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Jl. N. Daulay, Pandan, Sumatera Utara 22611

 (0631) 371082  (0631) 372006

 <https://tapanulitengahkab.bps.go.id>

 [bps1204@bps.go.id](mailto:bps1204@bps.go.id)